



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH
(DPMPTSP)**

Jl. Cikditiro No. 29 Palu – ☎ Telp. (0451) 458714 Kode Pos 94111
Website : <http://dpmptsp.sultengprov.go.id>



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR: 000-7.2/251/Bappeda - 9.51/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c angka 3 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 956);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubenrur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal ... 6 Oktober 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


ANWAR HAFID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

1. Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Renja Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Renja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Renja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah;
15. Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
18. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
19. Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Renja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
21. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;

22. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
23. Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
24. Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah;
26. Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
29. Renja Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah;
30. Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
31. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
32. Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
33. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
34. Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
35. Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
36. Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
37. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah;
38. Renja Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah;
39. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
40. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Cikditiro No. 29 Palu – Telp. (0451) 458714 Kode Pos 94111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 800.1.U.1/1039/Pr06-/DPMPTSP**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi. Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Nndonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan OWS Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Validasi, Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 74);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 800.1.11.1/ 938/ Prog./DPMPTSP Tanggal 22 September 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025- 2029

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi masing-masing dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada Tanggal 09 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOH. RIFANI, S. Sos., M. Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19710423 200003 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah telah dapat terselesaikan.

Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan program kerja yang lebih maksimal tahun 2026 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang pendanaannya bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2026

Sangat disadari, bahwa Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna namun diharapkan tetap dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut di atas.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa Meridhoi semua karya kita sebagai wujud pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

Palu, 04 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH



I. MOH. RIFANI, S. Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710423 200003 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN REVIEW	
KINERJA PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	11
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	13
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	15
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	22
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	23
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	25
4.1 Program dan Kegiatan 2025	25
 BAB V PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renja DPMPTSP dan pencapaian Renstra DPMPTSP periode 2022	12
Tabel 2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	16
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah DPMPTSP Tahun 2025	24
Tabel 3.2 Indikator Sasaran Perangkat Daerah DPMPTSP	24
Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2025	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja ini selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Penyusunan RenjaDPMPTSP Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Strategis Renstra DPMPTSP periode Tahun 2025 – 2029, dari segi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta pagu anggaran. Untuk Nomenklatur program kegiatan, seluruhnya mengacu pada RKPD Tahun 2026 dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah

adalah landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan landasan operasional sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2020– 2024

- Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
- Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021 – 2026
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 800/01.45.B/DPMPTSP Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program kerja bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu satu tahun sesuai tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah :

- Sebagai pedoman dan landasan bagi seluruh aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan program pembangunan khususnya bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Sebagai dasar untuk evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kegiatan dalam pencapaian target dan sasaran.
- Sebagai dasar untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan program yang disusun.
- Sebagai sarana untuk melaksanakan keterpaduan pelaksanaan program dengan unit kerja lainnya melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- Sebagai tolok ukur bagi aparat pengawasan dalam mengevaluasi dan menilai kinerja unit kerja yang bersangkutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berisi pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen lainnya serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penyusunan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN REVIEW KINERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Memuat kajian atau review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, serta pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD serta rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian tentang proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta alasannya dan penjelasan apabila terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memuat hasil telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas program nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Berisi hasil perumusan atas tujuan dan sasaran Renja OPD yang didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dan dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

4.1 Program dan Kegiatan 2026

Berisi uraian mengenai rumusan program dan kegiatan, garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan kegiatan, indikator kinerja, target kinerja serta lokasi dan kebutuhan dana indikatif.

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN REVIEW KINERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun Lalu dan

Pencapaian Renstra PD :

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Validasi, Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pada Tahun 2024 terdapat 6 (enam) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan yang dilaksanakan dan semuanya dapat memenuhi target yang direncanakan.
2. Faktor pendukung tercapainya target yang direncanakan diantaranya yaitu tersedianya anggaran yang cukup, jumlah SDM yang memadai serta efisiensi penggunaan waktu yang tersedia.
3. Adapun target kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional:
PMDN/PMDN (Rp.) : Rp. 92.500.000.000.000,-
 - b. Jumlah Investor Berskala Nasional:
PMA/PMDN (Proyek) : 2.600 Proyek
 - c. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
Hasil survey IKM 95% (Sangat Baik) dengan berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 14 unsur pelayanan
4. Pencapaian target kinerja program prioritas pada tahun 2024 yaitu:
 - a. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional:

PMDN/PMDN (Rp.) : Rp. 139.882.280.000.000 ,-

b. Jumlah Investor Berskala Nasional:

PMA/PMDN (Proyek) : 2.727 Proyek

c. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Hasil survey IKM 97,68 % (Sangat Baik) dengan berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 14 unsur pelayanan

Dari data tersebut diketahui bahwa target kinerja program prioritas dalam periode 2024 telah tercapai dengan sangat baik.

Rekapitulasi evaluasi kinerja pada hasil pelaksanaan Renja DPMPTSP dan pencapaian Renstra DPMPTSP s/d akhir periode Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renja DPMPTSP dan pencapaian
Renstra DPMPTSP periode 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinera	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp. 92.500.000.000.000,-	Rp. 139.882.280.000.000,-	66,13%
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	2.600 Proyek	2.727 Proyek	95,34%
2	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Profesional dan Akuntabel	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	95% (Sangat Baik)	97,68% (Sangat Baik)	97,26%

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan non pelayanan dasar, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.

Penyusunan Renja 2026 DPMPTSP merupakan hirarki dari Renstra OPD periode 2021 - 2026 yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyusunan program dan kegiatan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi

dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan tentunya tidak terlepas dari tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, visi dan misi kepala daerah serta sinergitas program kementerian dan lembaga di tingkat pusat khususnya program dan kegiatan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) pusat.

Dalam perjalanan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah masih terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi, diantaranya sebagai berikut :

1. Kompetensi sumber daya aparatur DPMPTSP belum seluruhnya memadai
2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan belum optimal
3. Belum maksimalnya penyelenggaraan event-event pameran promosi investasi
4. Sebagian Kabupaten/Kota tata ruangnya belum dilegal formalkan sehingga peruntukan lahan di sejumlah wilayah menjadi tumpang tindih dan mempengaruhi investasi di daerah
5. Sebagian Kabupaten/Kota belum menyusun Rencana Umum Penanaman Modal, yang merupakan dokumen perencanaan strategis di bidang penanaman modal
6. Sebagian Kabupaten/Kota untuk Regulasi kemudahan investasi daerah belum seluruhnya tersedia
7. Sebagian Kabupaten/Kota belum optimal menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis OSS RBA.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN BERDASARKAN KUA-PPAS						CATATAN PENTING
PROGRAM	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)		PROGRAM	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA		KEBUTUHAN DANA		
1	2	3	4	5		1	2	3	9	10	11	
				24,943,760,000						16,546,771,076.80		
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	71 Indeks	21,867,680,000		1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,25 Indeks	13,896,868,588.79		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPMPTSP	88 Nilai	1,312,060,800			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIPDPMPTSP	81 Nilai	325,766,500		
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	425,107,699			a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	197,518,500		
	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Laporan	164,007,600			b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Laporan	48,450,000		
	c Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	310,958,410			c Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	39,888,000		
	d Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	30 Data	205,993,546			d Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	27 Data	19,972,500		
	e Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	1 Dokumen	205,993,546			e Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	1 Dokumen	19,937,500		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	96.5%	12,705,122,080		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran	100%	12,208,584,296.79		
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/Perbulan	12,196,917,197			a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/Perbulan	10,546,771,392.79		
	b Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	152,461,465			b Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,473,360,000		
	c Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	25,410,244			c Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	25,000,000		
	d Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	228,692,198			d Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	66,389,068		

Tabel 2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 (lanjutan)

RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN BERDASARKAN KUA-PPAS					CATATAN PENTING
PROGRAM	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA		KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	1	2	3	9	10	11
e Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	25,410,244	e Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	61,918,586	
f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	18 Laporan	76,230,732	f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	18 Laporan	35,145,250	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	174,941,440	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	66,524,150	
a Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		a Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	16,824,400	
b Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	174,941,440	b Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan	32,875,600	
c Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		c Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16,824,150	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Laporan	852,839,520	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen	77,813,500	
a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	274,898,605	a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	27,500,100	
b Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	238,226,506	b Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	17,669,900	
c Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			c Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5,000,000	
d Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	210 Orang	339,714,405	d Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	210 Orang	22,643,500	
e Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			e Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	5,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1,552,605,280	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	204,445,962	
a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40,183,869	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21,275,383	
b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	1 Paket	86,496,502	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	1 Paket	24,999,979	

Tabel 2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 (lanjutan)

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN BERDASARKAN KUA-PPAS						CATATAN PENTING		
PROGRAM		LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM		LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA		KEBUTUHAN DANA			
	c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	290,653,814		c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	54,600,000	
	d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,135,271,091		d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	93,570,650	
	e	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				e	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4,999,950	
	f	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				f	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5,000,000	
	g	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1,946,223,520		g	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	56,417,700	
	a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	770,243,491		a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			
	b	Pengadaan Mebel	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 Paket	403,790,314		b	Pengadaan Mebel	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 Paket	28,692,500	
	c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6 Unit	772,189,715		c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit	22,725,200	
	d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	5,000,000	
	h	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2,186,768,000		h	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	664,503,930	
	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	653,913,632		a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	423,542,518	
	b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,532,854,364		b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	240,961,412	
	g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1,137,119,360		g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	292,812,550	
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	48 Unit	467,356,052		a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	79 Unit	192,930,000	
	b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	190 Unit	296,788,153		b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	65 Unit	49,549,800	

Tabel 2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 (lanjutan)

RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN BERDASARKAN KUA-PPAS					CATATAN PENTING
PROGRAM	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA		KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	1	2	3	9	10	11
c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	186,487,575	c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
d Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	186,487,575	d Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50,332,750	
2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase kebijakan pemberian kemudahan fasilitas/insetif investor	95%	535,820,000	2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Dokumen Perencanaan Peluang Investasi yang tersedia Persentase Permintaan Insetif dan	100%, 90%	449,999,150.01	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insetif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen/Laporan Deregulasi dan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insetif dalam Rangka Perbaikan Iklim Penanaman Modal & Kemudahan Berusaha	1 Dok/Lap	250,763,760	1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insetif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Persentase Permintaan Pemberian dan Kemudahan Penanaman Modal serta Rekomendasi Kebijakan Regulasi Perizinan Berusaha	100%	104,737,050.00	
a Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insetif dan Kemudahan Penanaman Modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insetif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	83,587,920	a Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insetif dan Kemudahan Penanaman Modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insetif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	34,640,150	
b Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	83,587,920	b Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen	50,000,050	
c Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Dokumen	83,587,920	c Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Dokumen	20,096,850	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		Jumlah Dokumen Pengembangan peta potensi investasi daerah berbasis spasial	1 Dokumen	285,056,240	2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		Persentase Dokumen Perencanaan Penanaman Modal dan Peluang Investasi yang tersedia	93%	345,262,100.01	
a Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	136,657,097	a Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	86,388,400	
b Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	148,399,143	b Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	258,873,700.01	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN BERDASARKAN KUA-PPAS					CATATAN PENTING
PROGRAM	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA		KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	1	2	3	9	10	11
3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase peningkatan investor berinvestasi di Sulawesi Tengah melalui pameran promosi investasi dalam dan luar daerah serta media promosi penanaman modal lainnya	55%	523,610,000	3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi	100%	549,999,638	
	1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Provinsi	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1 Dok/Lap	523,610,000	3 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Provinsi		Persentase Daya Minat Pengunjung dari Kegiatan Promosi	100%	549,999,638	
	a Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	493,240,620	a Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 Dokumen		491,238,288	
	b Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	30,369,380	b Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		58,761,350	
4 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase capaian realisasi investasi Provinsi Sulawesi Tengah terhadap target Pemerintah Pusat	100%	86,920,000	4 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha PMA dan PMDN Terhadap Ketentuan Penanaman Modal	60%	599,999,950	
	3 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Realisasi Investasi PMA/PMDN, Laporan jumlah serapan tenaga kerja serta Laporan monitoring terhadap perusahaan pengguna fasilitas penanaman modal	1 Laporan	86,920,000	3 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Perusahaan PMDN yang Menyampaikan LKPM	965 Perusahaan	599,999,950	
	a Pengawasan Penanaman Modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2 Kegiatan Usaha	22,251,520	a Pengawasan Penanaman Modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta	5 Kegiatan Usaha		219,963,700	
	b Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	4 Kegiatan Usaha	34,594,160	b Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6 Kegiatan Usaha		134,825,350	
	c Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Pelaku Usaha	30,074,320	c Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis	420 Pelaku Usaha		245,210,900	
5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase data penanaman modal dan perizinan - non perizinan yang dikelola serta dimutakhirkan kedalam sistem informasi penanaman modal	95%	861,140,000	5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	92%	350,000,000	
	3 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang	Jumlah Laporan data penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola, dianalisis dan dimutakhirkan dalam sistem informasi potensi investasi	1 Laporan	861,140,000	3 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat		Persentase Kualitas Analisa Data PMA dan PMDN Kabupaten Kota Provinsi	100%	350,000,000	
	a Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	861,140,000	a Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan	3 Dokumen		350,000,000	

Tabel 2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 (lanjutan)

RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN BERDASARKAN KUA-PPAS					CATATAN PENTING
PROGRAM	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA		KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	1	2	3	9	10	11
6 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase pemenuhan indeks kepuasan masyarakat	97%	1,068,590,000	6 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usahayang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan Persentase Hasil Tindak Lanjut Pelayanan	90%, 93%	699,903,750	
1 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan/dokumen layanan pengaduan dan informasi, pelaksanaan advokasi, pengembangan standar layanan perizinan dan inovasi layanan, SP dan	1 Dok/Lap	940,493,843	1 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Konsultasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	95%	341,755,550	
a Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah	585 Kegiatan Usaha	151,662,156	a Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha	1100 Kegiatan Usaha	155,655,550	
b Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	585 Pelaku Usaha	788,831,687	b Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	35 Pelaku Usaha	186,100,000	
2 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah dokumen/laporan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan, layanan perizinan dan nonperizinan berbasis IT serta penyelenggaraan PTSP	1 Dok/Lap	128,096,157	2 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Persentase Permohonan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan Terverifikasi dan Terbit Otomatis	100%	358,148,200	
a Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	46,795,693	a Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan	1 Dokumen	30,200,000	
b Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5Pelaku Usaha	81,300,464	b Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1100 Pelaku Usaha	327,948,200	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Delapan program prioritas nasional dengan sebutan Asta Cita yang isi salah satunya adalah Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi. Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (prioritas 5), yang penjelasannya antara lain adalah melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan melalui perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kompetensi aparatur. Sejalan dengan hal tersebut maka untuk membangun ***"Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif"*** sebagaimana telah menjadi salah satu Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang termuat dalam RPJMD tahun 2025 - 2029, maka harus didukung dengan upaya-upaya kemudahan investasi dan peningkatan pelayanan perizinan yang berkualitas bagi para pelaku usaha sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat terwujud.

Seiring dengan uraian di atas, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah (DPMPTSP) dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan dalam Rencana Strategis pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5(lima) tahun. Tujuan berisi target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun,satu tahun, semester, triwulan atau bulanan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta melihat latar belakang dan mencerminkan fenomena-fenomena yang ada, DPMPTSP merupakan bagian dari satuan perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang sepenuhnya mendukung pemenuhan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di masa yang akan datang. Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam urusan penanaman modal yaitu:

Misi 2“**Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan**” .

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Sasaran dan Tujuan yang dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	Proyek	2770
			Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp Juta	140.100.000
			Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	4.610
			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan)	Orang/Perusahaan	52

Sedangkan Formulasi dan Metodologi Perhitungan Indikator Sasaran dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Indikator Sasaran Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (INDIKATOR SASARAN)	FORMULA INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN	METODOLOGI
1.	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	¹ -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	Jumlah investor (proyek) berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan	Mengukur ketercapaian jumlah Investor (proyek) berskala Nasional PMDN/PMA di wilayah Sulawesi Tengah	Jumlah investor (proyek) berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan yang direlease oleh Kementerian Investasi/BKPM secara periodik
		² - Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Juta Rupiah)	Jumlah capaian nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan	Mengukur ketercapaian nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) DI WILAYAH Sulawesi Tengah	Jumlah capaian nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan yang direlease oleh Kementerian Investasi/BKPM secara periodik
		³ - Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Jumlah capaian nilai realisasi investasi PMDN di wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan	Mengukur pergerakan capaian nilai realisasi Investasi PMDMN di wilayah Sulawesi Tengah yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah capaian nilai realisasi investasi PMDN di wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan yang direlease oleh Kementerian Investasi/BKPM secara periodik
		⁴ - Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DIBAGI Jumlah Perusahaan di Wilayah Sulawesi tengah	Mengukur capaian serapan Tenaga Kerja Indonesia dari kegiatan investasi di wilayah Sulawesi Tengah	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DIBAGI Jumlah Perusahaan di Wilayah Sulawesi tengah yang direlease oleh Kementerian Investasi/BKPM secara periodik

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan 2026

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam Program dan Kegiatan yang disertai indikator kinerja baik Program maupun Kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Terdapat 6 (enam) Program, dan 15 (lima belas) Kegiatan dan 48 (empat puluh delapan) Sub Kegiatan dalam Renja DPMPTSP Tahun 2026. 6 (enam) Program tersebut terdiri dari 1 (satu) Program rutin penunjang urusan pemerintahan daerah dengan 8 (delapan) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan. Selanjutnya 5 (lima) Program teknis dengan 7 (tujuh) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai Program dan Kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah maupun luar daerah. Total kebutuhan dana untuk Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 16.546.771.076.80 ,- dengan sumber dana APBD.

Penjabaran rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja serta Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi

Tengah untuk periode tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 :

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17
								16,546,771,076.8							17,984,995,92	
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		79,89	80	80,25 Indeks	13,896,868,588.7					DPMPTSP	80,5	14,964,995,92	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPMPTSP		84	80	81 Nilai	325,766,50					DPMPTSP	81,5	410,987,75	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5	5	8 Dokumen	197,518,50	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	8 Dokumen	259,818,555.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3	3	3 Laporan	48,450,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	3 Laporan	49,918,500.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	1	1 Laporan	39,888,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Laporan	51,250,700.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-	-	27 Data	19,972,50	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	27 Data	25,000,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektor	-	-	-	1 Dokumen	19,937,50	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Dokumen	25,000,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP (Lanjutan)

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran		~96,5%	~100%	100 Persen	12,208,584,296.75					DPMPTSP	100 Persen	12,511,182,42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		70	70	130 Orang/Bulan	10,546,771,392.79	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	DAU			DPMPTSP	130 Orang/bulan	10,968,641,919.8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	1	1 Dokumen	1,473,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	DAU			DPMPTSP	1 Dokumen	1,300,000,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		300 Dokumen	250 Dokumen	200 Dokumen	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	200 Dokumen	45,000,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	1	1 Laporan	66,389,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Laporan	80,000,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1	1	1 Dokumen	61,918,588	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Dokumen	72,540,500.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		18	18	18 Laporan	35,145,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	18 Laporan	45,000,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		1	3	1 Laporan	66,524,150					DPMPTSP	1Laporan	90,825,80	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	16,824,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	21,126,05	
	2.18.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	1	11 Laporan	32,875,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	11 Laporan	42,875,600.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	16,824,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Laporan	26,824,150.0	

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP (Lanjutan)

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8			10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan		1	1	1 Laporan	77,813,50						DPMPTSP	1 Laporan	152,169,65	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	27,500,10	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	DAU				DPMPTSP	1 Paket	77,200,150.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1	1	7 Dokumen	17,669,90	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	DAU				DPMPTSP	7 Dokumen	29,969,500.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.05.0005	Monitoring,Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	5,000,00							1 Dokumen	5,000,000.0	
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		210	185	210 Orang	22,643,50	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU				DPMPTSP	210 Orang	30,000,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	5,000,00							50 Orang	10,000,000.0	
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		1	1	1 Laporan	204,445,96						DPMPTSP	1 Laporan	366,138,45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	1	1 Paket	21,275,38	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU				DPMPTSP	1 Paket	28,757,950.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan			1	1 Paket	24,999,97	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU				DPMPTSP	1 Paket	60,000,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	1	1 Paket	54,600,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU				DPMPTSP	1 Paket	102,680,500.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	1	1 Laporan	93,570,65	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU				DPMPTSP	1 Laporan	160,700,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	4,999,95							1 Dokumen	7,000,000.0	
	2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	5,000,00							1 Dokumen	7,000,000.0	

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP (Lanjutan)

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		1	1	1 Laporan	56,417,70					DPMPTSP	1 Laporan	271,177,80	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan		1	5			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	DAU			DPMPTSP	1 Unit	50,000,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		5	5	3 Paket	28,692,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	DAU			DPMPTSP	3 Paket	120,950,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		21	10	3 Unit	22,725,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	5 Unit	90,227,800.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	5,000,000						5 Unit	10,000,000.0	
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	1	1 laporan	664,503,93					DPMPTSP	1 Laporan	772,033,44	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	1	1 Laporan	423,542,518	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Laporan	433,662,261.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	1	1 Laporan	240,961,412	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Laporan	338,371,186.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP (Lanjutan)

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		1	1	1 Laporan	292,812,55					DPMPTSP	1 Laporan	390,480,60	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		26	79	79 Unit	192,930,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	DAU				79 Unit	192,930,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		148	65	65 Unit	49,549,80	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	DAU			DPMPTSP	65 Unit	76,580,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Unit	20,000,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3	3	3 Unit	50,332,75	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	3 Unit	100,970,600.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Dokumen Perencanaan Peluang Investasi yang tersedia Persentase Permintaan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditindaklanjuti sesuai dengan Ketentuan		100 dan 89	100 dan 89	100% dan 90%	449,999,150.0					DPMPTSP	100% dan 90%	500,000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Permintaan Pemberian dan Kemudahan Penanaman Modal serta Rekomendasi Kebijakan Regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Pusat dan di Daerah yang ditindaklanjuti		100	100	100%	104,737,05					DPMPTSP	100%	132,547,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1	1	1 Dokumen	34,640,15	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Dokumen	36,450,400.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		1	1	2 Dokumen	50,000,05	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	2 Dokumen	50,000,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.02.1.01.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		1	1	1 Dokumen	20,096,85	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Dokumen	46,097,100.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP (Lanjutan)

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase Dokumen Perencanaan Peluang Investasi yang tersedia		93	93	93%	345,262,100.0					DPMPTSP	93%	367,452,500.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1	1	1	1 Dokumen	86,388,400.0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	DAU			DPMPTSP	1	100,656,400.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Rgional)	Jumlah Daerah yang Telah dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi											13	20,000,000.0	
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1	1	1	1 Dokumen	258,873,700.0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1	246,796,100.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi		100	77	100%	549,999,630.0					DPMPTSP	100%	630,000,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Provinsi	Persentase Daya Minat Pengunjung dari Kegiatan Promosi		100	100	100%	549,999,630.0					DPMPTSP	100%	630,000,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1	1	1	2 Dokumen	491,238,280.0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	2 Dokumen	544,427,250.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1	1	1	1 Dokumen	58,761,350.0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Dokumen	85,572,750.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh tzn Sesuai Ketentuan Persentase Hasil Tindak Lanjut Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non perizinan		92 dan 89	92 dan 89	90% dan 93%	699,903,750.0					DPMPTSP	94% dan 90%	800,000,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Konsultasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan		95	95	95%	341,755,550.0					DPMPTSP	95%	326,823,700.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.04.1.01.0007	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah		995	2200	1100 Kegiatan Usaha	155,655,550.0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1200 Kegiatan Usaha	160,535,700.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.04.1.01.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		29	29	35 Pelaku Usaha	186,100,000.0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	40 Pelaku Usaha	166,288,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP (Lanjutan)

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-	Persentase Permohonan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan		100	100	100%	358,148,20					DPMPTSP	100%	473,176,300.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan		1	1	1 Dokumen	30,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	DAU			DPMPTSP	1 Dokumen	50,525,750.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara		1010	1,324	1100 Pelaku Usaha	327,948,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	DAU			DPMPTSP	1150 Pelaku Usaha	422,650,550.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha PMA dan PMDN Terhadap Ketentuan Penanaman Modal		47	100	60%	599,999,95					DPMPTSP	65%	690,000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan PMDN yang Menyampaikan LKPM				965 Perusahaan	599,999,95					DPMPTSP	1049 Perusahaan	690,000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta		17	3	5 Kegiatan Usaha	219,963,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	7 Kegiatan Usaha	211,793,500.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalammerealisasikan Kegiatan Usahanya		6	6	6 Kegiatan Usaha	134,825,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	6Kegiatan Usaha	114,552,750.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis		378	420	420 Pelaku Usaha	245,210,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	420 Pelaku Usaha	363,653,750.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.06	PROGRAMPENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal		90	90	92%	350,000,00					DPMPTSP	93%	400,000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kualitas Analisa Data PMA dan PMDN Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Tengah		100	100	100%	350,000,00					DPMPTSP	100%	400,000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		1	4	3 Dokumen	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	3 Dokumen	400,000,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026. Tentu saja keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf.

Rencana Kerjaini telah diupayakan agar memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan Rencana Kerjaini nantinya membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian dokumen perencanaan ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta mengacu pada misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Rencana Kerjaitahun 2026 ini menjadi acuan kerja bagi unit-unit pelaksana dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Untuk itu semua unit kerja baik Kesekretariatan maupun Bidang-bidang harus melaksanakan tugas dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan akan membawa kemajuan pembangunan ekonomi khususnya peningkatan investasi di daerah, serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Tentu saja dukungan semua pihak diperlukan, khususnya seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap peningkatan investasi dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Sulawesi Tengah. Disamping itu juga keberhasilan pelaksanaan program ini, akan sangat ditentukan oleh respons dari kalangan dunia usaha serta dukungan dari instansi terkait dan masyarakat.

Palu, 04 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710423 200003 1 002